

Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan

Anto Hidayat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
anto_hi@yahoo.com

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan. Kebijakan kependudukan dipandang penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah. Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru menghadapi tantangan bagaimana menggerakkan pembangunan yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Kependudukan menjadi isu penting bagi Kota Tangerang Selatan seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Sebagian besar jumlah penduduk yang berpusat pada selang umur yang produktif menjadi modal pembangunan bagi Kota Tangerang Selatan. Namun untuk mencapai kondisi yang diinginkan Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada persoalan tingginya angkatan kerja, lemahnya daya saing kerja, urbanisasi yang belum terkendali, pengangguran dan kemiskinan, dan belum efisiennya pelayanan dasar. Peningkatan kualitas penduduk perlu dijadikan skala utama dalam perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Keberhasilan pembangunan pada gilirannya sangat ditentukan oleh sejauh mana masalah kependudukan dijadikan prioritas oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk diyakini tidak akan berlangsung secara berkesinambungan.

Kata kunci: kependudukan, pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan

Pengantar

Kependudukan merupakan fenomena hulu pemerintahan. Sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengendalikan kependudukan pada gilirannya dapat mengatasi atau mengurangi fenomena yang terjadi di hilir, seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, kriminalitas, krisis lingkungan hidup dan sebagainya. Besarnya jumlah penduduk dengan selang usia produktif yang di satu sisi menjadi sebuah keuntungan, bila penduduk usia produktif dikatakan berkualitas. Tetapi di sisi lain dapat menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian rendah, serta kondisi kesehatan yang buruk, sehingga tidak dapat memproduksi secara optimum.

Keberadaan pemerintahan daerah adalah mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara demokratis. Pada dekade ke depan, pemerintah dihadapkan pada pergeseran demografi penduduk yang akan berubah secara drastis. Peran pemerintah daerah dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 menjadi sangat besar dalam menentukan kemajuan daerahnya. Salah satu aspek mendasar pemberian otonomi kepada daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar

prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Kota Tangerang Selatan diresmikan pada 29 Oktober 2008 berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008. Sebagai daerah otonom yang baru Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada tantangan untuk dapat menyejahterakan masyarakatnya. Persoalannya, tidak mudah menempatkan peningkatan kualitas penduduk sebagai skala utama dalam perencanaan pembangunan. Padahal keberhasilan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana masalah kependudukan dijadikan prioritas oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk diyakini tidak akan berlangsung secara berkesinambungan. Kerangka inilah yang seharusnya dijadikan landasan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan perencanaan pembangunan. Paper ini membahas isu-isu utama kependudukan dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan, berkaitan dengan pentingnya mengintegrasikan dimensi kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berjalan secara berkesinambungan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih bermartabat. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang populer terutama sejak dipublikasikannya laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development - WCED*) yang dipimpin oleh G.H. Brundtland di tahun 1987. Pada tahun 1992, pada KTT Bumi (*United Nation Conference on Environmental Development – UNCED*) di Rio de Janeiro, pentingnya pendekatan pembangunan secara berkelanjutan semakin dipertegas.

Laporan WCED yang berjudul “*Our Common Future*” (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. *Pertama*, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. *Kedua*, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Pilar pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Sejalan dengan itu, Todaro berpendapat (2000) bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan

mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Sedangkan Smith (1991) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sebagai pembangunan yang meminimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan *entropy* bumi.

Pemikiran di atas menunjukkan adanya kesadaran kritis tentang terbatasnya sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan manusia yang terus meningkat mengharuskan pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumber daya manusia dengan cara menyeraskan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan maka indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Djajadiningrat (2005) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu: a) keberlanjutan ekologis; b) keberlanjutan di bidang ekonomi; c) keberlanjutan sosial dan budaya; d) keberlanjutan politik; e).keberlanjutan pertahanan keamanan. Sedangkan Otto Soemarwoto dalam Sutisna (2006), mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok ukur itu meliputi: a) pro lingkungan hidup; b) pro rakyat miskin; c) pro kesetaraan gender; d) pro penciptaan lapangan kerja; e) pro dengan bentuk negara kesatuan RI; dan f) harus anti korupsi, kolusi serta nepotisme.

Dengan demikian tolok ukur pembangunan yang berhasil, yang awalnya hanya memberikan tekanan pada produktivitas ekonomi, kini menjadi semakin kompleks. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat seiring dengan semakin terbatasnya sumber daya alam mengharuskan pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien. Pendekatan pembangunan dituntut untuk memperhatikan keseimbangan dan keadilan antar generasi. Pembangunan berkelanjutan ditempatkan sebagai konsep pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan

Pembangunan kependudukan menunjuk pada pembangunan sumber daya manusia. UNDP (1995) mendefinisikan pembangunan sumber daya manusia sebagai suatu proses

untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process enlarging people's choices*). Dalam konsep ini penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), bukan alat, cara, atau instrumen. Pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan. Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Pembangunan manusia mencakup dimensi yang sangat luas, di antaranya adalah mencakup aspek produktivitas, pemerataan, berkelanjutan, dan pemberdayaan. UNDP sejak 1990 menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* sebagai indikator, walaupun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar tersebut adalah 1) tingkat kesehatan yang tercermin dengan umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup; 2) berpengetahuan dan berketerampilan; dan 3) akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Pada kenyataannya selama beberapa dekade Indonesia mengabaikan pembangunan berwawasan kependudukan. Hal ini tidak lain karena keinginan pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang senantiasa tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi obsesi dan ukuran bagi keberhasilan pembangunan nasional. Meskipun Indonesia memiliki wawasan trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, tetapi pada realitanya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan nasional.

Padahal studi dan literatur memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek investasi dalam sumber daya manusia memang terlihat sebagai suatu upaya yang tidak kasat mata. Investasi dalam kesehatan dan pendidikan terlihat dalam jangka panjang dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Rosenzweig (1988) misalnya menemukan hubungan positif sebesar 0.49 antara *enrollment rate* sekolah dasar dari wanita usia 10–14 tahun terhadap peningkatan GNP per kapita. Demikian pula ditemukan hubungan positif sebesar 0.54 antara tingkat melek huruf dengan

pertumbuhan GNP per kapita. Studi tersebut dilakukan atas data makro dari 94 negara berkembang.

Dengan demikian, indikator keberhasilan ekonomi harus diubah dari sekedar GNP atau GNP per kapita menjadi aspek kesejahteraan atau memakai terminologi UNDP adalah *Human Development Index*. Memang dengan mempergunakan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan berkesinambungan. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas namun sekaligus juga meningkatkan pengangguran dan pengangguran tidak kentara.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk serta daya dukung sumber daya alam dan lingkungan yang ada nyatanya tidaklah berlangsung secara berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dewasa ini, terjadinya krisis tersebut tidak lepas dari kebijaksanaan ekonomi yang kurang mengindahkan dimensi kependudukan dan lingkungan hidup. Di sinilah pentingnya untuk mengetahui proyeksi demografi. Sebagaimana dikemukakan oleh Wolf dan Amirkhanyan (2010) bahwa penting bagi pemerintah untuk memahami susunan demografi penduduk, populasi angkatan kerja, ketersediaan lapangan kerja, serta jumlah angka pensiun. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan. Belum terjadi strategi pembangunan yang serius berorientasi pada aspek kependudukan selama ini.

Dengan tidak diperhatikannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan sama artinya dengan menzalimi generasi berikutnya. Karena itu perlunya kebijakan yang mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan ada suatu jaminan akan berlangsung proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Manfaat yang paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Ini artinya pembangunan berwawasan kependudukan akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan semata.

Gambaran Umum Kependudukan Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten. Secara administratif Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km² atau 14.719 Ha.. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Dalam Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2010-2025 ditetapkan visi Kota Tangerang Selatan 2011-2016, yaitu "Terwujudnya Kota Tangerang Selatan Yang Mandiri, Damai, Asri dan Sejahtera". Upaya perwujudan visi tersebut dicapai melalui enam misi, yaitu 1) Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat; 2) Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan; 3) Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan; 4) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat; 5) Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa; 6) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1.303.569 jiwa dengan sebaran penduduk laki-laki berjumlah 658.701 jiwa atau 50,53% dan penduduk perempuan berjumlah 644.686 jiwa atau 49,47%. Dengan demikian penduduk Kota Tangerang Selatan meningkat sebesar 10,75% dari tahun 2009. Pertumbuhan penduduk tahun 2009-2010 merupakan pertumbuhan tertinggi dari 3 periode sebelumnya, yaitu 12,04%.

Dengan luas wilayah 147,19 km² maka kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 sebesar 8.856 jiwa per kilometer persegi. Hal ini berarti bahwa setiap kilometer persegi dihuni oleh 8.856 orang. Kepadatan terbesar berada pada Kecamatan Ciputat Timur, yaitu 11.881 per km². Sedangkan kepadatan terkecil terdapat di Kecamatan Setu, yaitu 4.291 per km². Kepadatan pada tahun 2010 meningkat sebesar 12,03% dari tahun 2009.

Dari data jumlah penduduk berdasarkan usia yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan berpusat pada selang umur yang produktif. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 225.2890 orang atau 21,77%, penduduk usia produktif (15-64 tahun)

777.690 orang atau 74,95%, dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 34.055 orang atau 3,28%. Persentase penduduk usia produktif berkaitan erat dengan potensi tenaga kerja. Persentase penduduk yang paling besar terdapat pada selang usia produktif, yaitu 30-34 tahun sebesar 30,34%, kemudian disusul selang usia 25-29 tahun sebesar 10,27%, dan usia 35-39 tahun sebesar 9,64%.

Sebanyak 32,62% penduduk Kota Tangerang Selatan adalah lulusan SLTA, angka ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Sementara itu, 14,51% penduduk Kota Tangerang Selatan berpendidikan tingkat perguruan tinggi.

Penduduk Kota Tangerang Selatan memiliki beragam mata pencaharian. Berdasarkan total jumlah penduduk, sebanyak 18,29% bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, 11,72% sebagai wiraswasta, 2,30% sebagai pegawai negeri sipil, 1,37% sebagai buruh. Sedangkan sebanyak 14,77% belum memiliki pekerjaan, 19,32% mengurus rumah tangga, 25,14% pelajar dan mahasiswa, dan 0,98% pensiunan. Jumlah lainnya tersebar pada berbagai mata pencaharian lainnya.

Isu-isu Kependudukan dalam Pembangunan di Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan memiliki potensi sebagai kota metropolitan baru yang dapat menyejahterakan masyarakatnya. Secara makro tujuan dan sasaran pencapaian pembangunan selama 5 tahun mendatang dapat diuraikan secara lebih terukur melalui pencapaian beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan

No.	Indikator Makro	Kondisi Tahun 2010	Target RJPMD 2015	Target RJPMDN 2014
1	IPM	75,38	76,52	-
2	Pertumbuhan PDRB (LPE)	8,7%	8,9%-9,2%	6,2%-6,8%
3	Angka Melek Huruf	98,15	98,25	-
4	PDRB Per Kapita	9,0 Juta	11,82 Juta	8,65 Juta
5	Angka Rata-rata Sekolah	10,15	10,20	8,70
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,54	68,69	71,41
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,22%	6,70%-7,82%	5%-6%
8	Tingkat Kemiskinan	5,54%	4,97%-5,02%	4,15-4,12

Sumber: RJPMD Kota Tangerang Selatan 2010-2025

Dalam hal ini indikator kinerja daerah secara umum ditunjukkan oleh dengan parameter kualitas manusia yang secara internasional diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2010 IPM Kota Tangerang Selatan tercatat 75,38. Dalam RJPMD 2015 target pencapaian IPM adalah 76,52. Kota Tangerang Selatan memiliki modal jumlah penduduk yang besar dengan mayoritas penduduk berusia produktif. Namun untuk mencapai kondisi yang diinginkan banyak isu-isu pembangunan yang harus dihadapi, termasuk isu kependudukan di dalamnya. Isu-isu yang berkaitan dengan kependudukan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Masih lemahnya daya saing tenaga kerja.

Kondisi tenaga kerja di Kota Tangerang Selatan masih dirasakan berpihak pada tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pencari pekerja lokal. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

2. Belum terkendalinya migrasi penduduk.

Letak Kota Tangerang Selatan yang berdekatan dengan ibukota negara menyebabkan perekonomian berjalan cepat dan oleh karenanya mulai banyak tersedia lapangan kerja yang merupakan daya tarik penduduk dari daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Tangerang Selatan. Sehingga wilayah Kota Tangerang Selatan menjadi sasaran penduduk di luar wilayah untuk datang. Jika tidak dikelola dengan baik tentunya akan berakibat meningkatnya jumlah pencari kerja luar daerah dan penyandang masalah sosial.

3. Pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan BPS angkatan kerja tahun 2009 adalah sebesar 62,92% dari keseluruhan penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 56,28%, sedangkan pengangguran sebesar 10,55%. Angka kemiskinan pada tahun 2010 5,54%. Isu ini terkait dengan perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, termasuk di dalamnya penguatan serta pengembangan usaha berbasis masyarakat.

4. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Pada tahun 2010, jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan paling banyak berpendidikan SLTA, yaitu 53,84% dari total jumlah pencari kerja, berikutnya 34,69% berpendidikan sarjana. Data ini menunjukkan besarnya kebutuhan kerja untuk lulusan

sarjana untuk dunia kerja. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, di samping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

5. Belum efisiennya pengelolaan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Isu ini terkait dengan peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Tangerang Selatan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang jumlahnya cukup banyak belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Sebagian besar fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang ada berpihak pada kalangan menengah ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya fasilitas rawat inap kelas III dan fasilitas pelayanan dengan menggunakan Jamkesmas/Jamkesda di rumah sakit swasta di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru yang berusia muda belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Hal ini berpengaruh pada belum optimalnya pelayanan publik. Di bidang pendidikan perlunya peningkatan fasilitas dan prasarana gedung sekolah dan yang lebih penting adalah program kebijakan dari pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Penutup

Pada era otonomi daerah isu kependudukan menjadi isu penting seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, perubahan struktur umur, tingginya pertumbuhan angkatan kerja, mobilisasi penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, daya saing tenaga kerja yang rendah, pengangguran dan kemiskinan, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya. Penting bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan.

Daftar Pustaka

- BPS. 2010. *Hasil Sensus Penduduk: Data Agregat Per kecamatan Kota Tangerang Selatan*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
- Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2010-2025.
- Rosenzweig, Mark R. 1998. *Human Capital population Growth, and Economic Development*, Journal of Policy Modeling, Special Issue on Population Growth and Economic Development.
- Sutisna, N. 2006. *Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. Urban and Regional Development Institute dan Yayasan Sugijanto Soegijoko. Jakarta
- Todaro, Michael P. 2000. Alih Bahasa: Han Munandar. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga. Jakarta.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja. 2005. *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu*: Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD). Jakarta.
- UNDP.1995. *Human Development Report*. Oxford University Press. New York.
- Wolf, Douglas A. and Amirkhanyan, Anna A., 2010, *Demographic Change and Its Public Sector Consequences*, Public Administration Rivew, Willey-Blackwell.
- www.un-documents.net/wced-ocf.htm